



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 23 Juni 2021

Halaman: 2

Penebalan PPKM Mikro

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro kembali diperpanjang dua pekan ke depan hingga 5 Juli 2021. Hanya saja PPKM mikro kali ini lebih fokus pada pengetatan mobilitas masyarakat seiring melonjaknya jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri.

Pergerakan masyarakat yang tidak terkendali membuat kasus harian bertambah banyak. Virus corona akan ikut bergerak hingga akhirnya didapati varian baru yang cenderung lebih ganas. Penebalan PPKM mikro ini dianggap sebagai jalan tengah karena pilihan karantina total tidak diambil pemerintah. Hanya saja, perpanjangan PPKM mikro sepertinya tidak dievaluasi karena kenyataannya tidak dibarengi dengan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

PPKM mikro tanpa diikuti protokol kesehatan sama saja sia-sia. Evaluasi PPKM sepertinya juga tidak optimal. Ini pula yang membuat pakar epidemiologi kecewa karena kebijakan yang diambil pemerintah sepertinya hanya setengah hati. Problema pandemi satu setengah tahun ini membuat masyarakat sudah jenuh, bosan dan cenderung tidak lagi peduli. Mereka lebih takut tidak bisa makan dari pada terpapar virus yang semakin ganas tersebut. Ekonomi juga belum membaik sementara jumlah pengangguran semakin banyak.

Jika pilihan pembatasan mobilitas masyarakat yang diambil, maka sebaiknya dilaksanakan dengan jelas dan tegas. Pelanggaran protokol kesehatan masih banyak dijumpai, sementara ketegasan yang diharapkan memicu efek jera bagi pelanggarnya semakin jauh dari harapan. Wajar jika kemudian muncul istilah *herd stupidity* yakni kebodohan atau kekebalan bersama, bukan lagi *herd community* alias kekebalan bersama, sebagai respons pakar epidemiologi atas kesemrawutan penanganan Covid-19 yang terjadi di negeri ini.

Bayangkan saja sudah satu setengah tahun pandemi berlangsung, namun masih banyak berita bohong atau hoaks yang bermunculan. Entah itu tentang konspirasi Covid-19, kegaduhan merek dan kandungan vaksin, efektivitas penggunaan masker, hingga pasien di-Covid-kan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini lagu lama yang sepertinya terus diputar untuk mengacaukan mental masyarakat. Pemerintah harusnya bisa mengatasi hal ini dengan edukasi serta sanksi yang elegan. ***-d

Yogyakarta, ...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005